

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Wacana SARA Pilgub DKI Jakarta 2017 di *Tribunnews.com* dan Norman Fairclough

Gambar 1.1
Judul Berita *Makin Memanas Tidaknya Tensi Politik Tergantung Proses Sidang Ahok*. *Tribunnews*, 1 Januari 2017.



Jika diamati, judul yang diwartakan *Tribunnews.com* tersebut cenderung mengintimidasi gubernur petahana Basuki Tjahya Purnama (Ahok). Tendensi yang dimaksudkan dalam pemilihan judul tersebut adalah tensi politik yang bergantung pada proses sidang kasus Ahok. Beberapa waktu menjelang Pilgub DKI Jakarta Ahok memang sedang terseret kasus dugaan ‘Penistaan Agama’. Kasus bermula saat Ahok melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada Selasa tanggal 27 September 2016. Saat berpidato dihadapan warga, Ahok menyatakan tidak

memaksa warga untuk memilih dirinya pada Pilkada 2017. Pernyataan itu disertai kutipan surah Al-Maidah ayat 51 yang menuai reaksi publik.

Pada Kamis, 6 Oktober 2016, video Ahok yang menyebut surat Al Maidah ayat 51 tersebut viral di media sosial lewat media soaial *facebook* milik Akun 'Buni Yani'. Video tersebut kemudian memicu kemarahan sebagian besar umat Islam. Lalu pada 7 Oktober 2016, Ahok dilaporkan oleh Habib Novel Chaidir Hasan yang dikenal sebagai alim ulama, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/1010/X/2016 Bareskrim. Ahok dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan agama Islam melalui kutipan surah Al-Maidah ayat 51.¹ Sejak itu, Ahok mulai menjadi sorotan

Hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, Ahok meminta maaf atas pernyataannya yang ia layangkan tersebut. Ahok juga mengatakan tidak bermaksud menyinggung umat Islam. Nahas pernyataan Ahok terkait dugaan penistaan agama masih juga memantik reaksi umat Islam dan menimbulkan aski besar-besaran. Demonstrasi pun kemudian pecah di depan balai kota DKI Jakarta pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2016.

Banyak yang berkata, semua karena Ahok. Bagi *haters* Ahok, kengototan Basuki Tjahaya Purnama menjadi gubernur lagi diyakini sebagai proxy masuknya kelompok pemodal-sipit ke Jakarta. Ia diserang dari berbagai penjuru. Mereka meminta Ahok agar tidak lupa sejarah kelam kelompok Tionghoa di negeri ini. Nampaknya, mereka yang

¹ <https://tirto.id/kronologi-kasus-dugaan-penistaan-agama-b457>. Diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 10.30 WIB.

menentang Ahok berharap ‘kode ancaman’ ini cukup ampuh menciutkan nyali Ahok dan warga Tionghoa. Dalam catatan penulis, tidak ada kekerasan berbasis etnis paling tragis dalam sejarah Nusantara kecuali yang dialami Tionghoa.

Kendati redaksi yang dipilih *Tribunnews.com* untuk dijadikan judul adalah salah satu pernyataan dari Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Djayadi selaku narasumber yang diwawancarai, jelas bahwa publik ingin ditekankan bahwa *kisruh* nya politik Indonesia saat Pilkada 2017 didominasi oleh kasus Ahok, yang mana dianggap sebagai politik identitas yang memicu kompetisi potensial memanas di Pilgub DKI Jakarta.

Dalam teori yang dikemukakan Norman Fairclough, sebelumnya kita perlu melihat praktik diskursif dari komunitas pemakai bahasa yang disebut *order of discourse*, yang artinya hubungan antara tipe informasi (berita) yang berbeda-beda. Secara sederhana, *order of discourse* layaknya penempatan sebaiknya diskursif itu berada. Kita perlu melihat *order of discourse* dari berita tersebut berbentuk tipe *hardnews*, feature, artikel, ataukah editorial. Hal ini dapat membantu dalam menafsirkan sebuah teks. Maka dapat diketahui bahwa *order of discourse* dari berita ini adalah *hardnews*.

Dalam unsur *pertama* teks, yaitu representasi yang dikemukakan Fairclough, berita ini adalah salah satu yang menggambarkan kondisi yang dialami Pilkada 2017 pada Pilgub DKI Jakarta, bahwa munculnya tensi

politik yang memanas sebab salah satu calon gubernur sedang terlibat kasus agama. Seandainya semua calon gubernur dan wakil gubernur tidak pernah terlibat kasus yang mencatut agama tertentu, maka tensi politik pada Pilgub DKI Jakarta tidak akan sepanas yang banyak santer diberitakan. Tidak akan ada isu SARA yang mewarnai Pilkada. Tidak akan ada kebergantungan tensi politik yang didasarkan pada pihak-pihak tertentu sehingga menjadi fokus yang diangkat dalam judul berita. Dalam hal ini, Fairclough melihat representasi berasal dari dua hal, yaitu bagaimana kelompok atau individu yang ditampilkan dalam anak kalimat, dan gabungan dari rangkaian antar anak kalimat dalam teks berita.

Dengan pemakaian kata ‘Memanas’ dalam judul berita, adalah termasuk kosa kata yang memiliki level tinggi dalam pemaknaannya. Dibandingkan kata ‘Meninggi’, atau jika dibanding susunan redaksi kalimat “Makin Meninggi Tidaknya Tensi Politik Tergantung Proses Sidang Ahok”, akan jauh terkesan lebih tidak emosional dibanding ‘Memanas’. Dalam hal ini pilihan kosa kata yang dipakai sangat berhubungan dengan bagaimana peristiwa, seseorang kelompok tersebut direpresentasikan, dan bagaimana realitas ditandakan dalam pemilihan bahasa. Lebih lanjut, pada representasi dalam kombinasi anak kalimat, judul berita ini tidak didapati anak kalimat pada susunan kalimatnya, begitupun representasi dalam rangkaian antarkalimat.

Dalam unsur relasi, berita ini hanya mewawancarai satu narasumber saja yang kemudian salah satu pernyataannya dijadikan fokus

utama yang termuat dalam judul. Pernyataan direktur eksekutif SMRC ini menjadi fokus utama yang ingin ditekankan pada benak khalayak, bahwa Ahok menjadi satu-satunya yang harus bertanggungjawab atas memanasnya tensi politik saat Pilkada, atas bergantungnya tensi politik ditengah polemik kasus yang menimpanya.

Sedangkan pada unsur identitas dalam teks yang ia kemukakan, partisipan dalam berita jelas tidak memakai kaidah-kaidah jurnalistik, *cover both side*, yaitu perlakuan adil terhadap semua pihak yang menjadi objek berita, atau bisa juga disebut pemberitaan yang berimbang. Pemberian porsi sama dalam pemberitaan membuat pembaca bisa menimbang dan memutuskan kebenaran dan keberpihakan mereka tanpa disetir oleh media yang mereka baca.

Kemudian dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menyelami kembali pemilihan fokus berita yang dijadikan judul. Ternyata, masuk dalam tabulasi Fairclough pada jenis intertekstualitas yang manifes. Yaitu representasi wacana (*Discourse Representation*), yang selanjutnya digunakan untuk menunjukkan pada sebuah istilah, bagaimana peristiwa tersebut disampaikan, dan mengapa wartawan memilih peristiwa tersebut untuk disampaikan dibanding fokus lainnya. Dalam berita ini, sama halnya wartawan memfokuskan konteks tertentu dibandingkan pernyataan direktur eksekutif MSRC yang lainnya. Sebab terlihat dari berita wartawan tidak hanya menanyakan satu pertanyaan, namun beberapa pertanyaan untuk dijawab narasumbernya.

Gambar 1.2

Judul Berita Pengamat: Jangan Rendahkan Agama Demi Tujuan Politik. Tribunnews, 19 Januari 2017.

The screenshot shows the website interface for Tribunnews.com. At the top, there is a navigation bar with categories like Home, Nasional, Internasional, Regional, Metropolitan, Sains, and Pendidikan. The main content area features the article title 'Pengamat: Jangan Rendahkan Agama Demi Tujuan Politik' and a sub-headline 'Pilgub DKI Jakarta'. The article text begins with 'TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Islam, Zuhairi Misrawi, mengkritik kinerja tim konsultan politik pasangan calon gubernur yang menciptakan isu dengan menggunakan isu politisasi suku, agama dan ras sebagai dagangan politik.' Below the text is a photo of a man in a blue shirt. To the right of the article are social media sharing icons for Facebook, Twitter, WhatsApp, and LinkedIn. A small video player is visible on the right side of the page.

Pada salah satu instrumen yang dikemukakan oleh Fairclough, intertekstualitas, berita dapat dideteksi dari pengutipan narasumber yang ada dalam berita. Menurut Fairclough, suara seorang sumber berita yang akan dijadikan berita dapat ditampilkan secara langsung (*direct discourse*) atau tidak langsung (*indirect discourse*).

Pada judul berita ini intertekstualitas ada pada *direct discourse*. Jika berubah menjadi *indirect discourse*, maka akan menjadi “Pengamat menyerukan agar jangan rendahkan agama demi tujuan politik”. Karena sesungguhnya, sumber berita yang berbentuk suara-suara yang sedemikian banyak dari suatu peristiwa, pada dasarnya tidak berbicara secara langsung kepada khalayak, tetapi melalui wartawan, secara otomatis wartawan pada

dasarnya tidak berbicara sendiri kepada khalayak. Wartawan memang memiliki otoriter dalam beritanya, mau dibawa kemana opini masyarakat, mau sisi yang mana yang hendak ditonjolkan dalam berita atas sebuah peristiwa.

Isu Agama dan Ras dalam pertarungan politik ini memang begitu menyeruakkan ke permukaan masyarakat. Maka tidak heran, jika berbagai pengamat politik dan kalangan tertentu memberikan statementnya, agar persoalan Agama ataupun Ras tidak dibawa-bawa dalam kontestasi ini. Namun, kasus yang melibatkan salah satu calon gubernur memang tidak dapat ditampik lagi. Seakan-akan, mau tidak mau, masyarakat Indonesia harus menyaksikan semua hal yang terjadi polemik politik negeri ini, menyaksikan Agama dan Ras terbawa pada arus politik yang ada.

Gambar 1.3

**Judul Berita *Anies Baswedan Sebut Tanda Kemenangan Makin Dekat.*
Tribunnews, 7 Januari 2017.**



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengenakan baju koko putih, Cagub **Anies Baswedan** mendatangi lebih dari 100 kader PKS yang tergabung dalam Forum Kemitraan Strategis dan tokoh masyarakat di MD Building Di jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat Malam (6/1/2017).

Selain memberitakan salah satu calon gubernur, Anies Baswedan yang mendatangi 100 lebih kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Forum Kemitraan Strategis dan tokoh masyarakat, juga terlihat *Tribunnews.com* ingin memperlihatkan bagaimana cagub ini berpakaian. Terlihat ketika *Tribunnews.com* medeskripsikan pakaian Anies pada awal berita yang mengenakan baju koko putih.

Menurut Marcel Denesi, hampir sejak awal sejarah, manusia mengenakan pakaian bukan hanya untuk perlindungan, tetapi juga demi

identifikasi dan jati diri. Pakaian bagi sebagian orang terkadang dianggap hal yang *remeh-temeh* dan tidak berpengaruh pada apapun, namun terlepas dari fungsi pokoknya, pakaian juga sebagai menjadi media komunikasi yang menjadi penting dalam dunia sosial yang mencakupi interaksi sosial, tindakan dan sikap. Cara pakaian pada zaman sekarang nyatanya mampu memberikan gambaran terhadap pemakainya, seperti halnya menggambarkan identitas sosial pemakainya.² Selain itu, pakaian juga berfungsi membedakan seseorang dengan orang lain atau suatu kelompok dengan kelompok yang lain.

Dalam hal ini, *Tribunnews.com* seperti sengaja menunjukkan kepada pembacanya bagaimana Anies berpenampilan. Baju koko banyak dipahami sebagai identitas umat Islam, meskipun asal usul baju koko bukan berasal dari sejarah Islam, namun baju koko selama ini menjadi bagian dari tradisi umat Islam di Indonesia dalam berpenampilan. Mau tidak mau, kita dipaksa menerima bahwa masyarakat Indonesia memiliki pandangan mutlak mengenai seseorang yang memakai baju koko adalah sosok yang religius, dan setiap orang yang memakai baju koko dianggap individu yang menggambarkan dari agama mana ia berasal. Dan perlu diketahui, bahwa wartawan hidup di antara pandangan dan keyakinan masyarakat tersebut.³

² Lihat Abdullah Bin Salim, "Pakaian Sebagai Media Komunikasi Artifaktual Dalam Pembentukan Identitas Sosial", Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

³ <http://www.hum.uva.nl/teun>, Makalah Congres Political Discourse, Aston University, Juli 2017. hlm. 12

Aspek identitas ini dilihat oleh Fairclough dengan melihat bagaimana identitas wartawan ditampilkan dan dikonstruksi dalam teks berita. Hal ini sangat menarik tatkala Fairclough membagi identifikasi wartawan, *pertama* apakah wartawan ingin mengidentifikasi dirinya menjadi bagian dari khalayak? *Kedua*, apakah wartawan mengidentifikasi dirinya secara mandiri?. Dalam berita ini, wartawan tentu jelas mengetahui tentang tradisi Indonesia perihal istilah ‘baju koko’ yang biasa dikenakan umat Islam di Indonesia. Wartawan terkesan ingin mencitrakan Anies lewat penampilannya sebagai cagub yang beragama Islam, memegang tradisi Islam Indonesia dengan cara berpakaianya, ingin memperlihatkan perbedaan Anies dan pasangan calon gubernur lainnya, ingin mencitrakan bahwa terdapat sosok pemimpin seperti ini di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Terlebih, bisa saja wartawan mendeskripsikan pakaian Anies dalam berita karena pada waktu itu persoalan politik di Indonesia khususnya Jakarta tengah mengalami polemik yang rumit mengenai Suku, Agama, Ras dan Antargolongan. Dan karena lawan politiknya terdapat cagub yang berbeda agama, keyakinan, dan tradisi. Seperti menyulut pembaca dan secara tidak disadari memasukkan ideologi tentang sosok pemimpin yang dibutuhkan Indonesia.

Tidak hanya Anies, calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 ini juga beberapa kali dicitrakan oleh *Tribunnews.com* dalam beberapa

pemberitaan. Beberapa berita yang secara tidak disadari menjelaskan bahwa Anies-Sandi adalah sosok pemimpin Muslim.

Gambar 1.4

Judul Berita *Sebelum Debat, Anies-Sandi Salat Jumat di Masjid yang Sama saat Mendaftar ke KPU.* Tribunnews, 27 Januari 2017.



Gambar 1.5

Judul Berita *Sandiaga Uno Banyak Hadiri Acara Keagamaan di Hari Akhir Kampanye Sebelum Berangkat Umroh.* Tribunnews, 11 Februari 2017.



Yang cukup menarik dalam hal ini adalah, diksi yang dipakai oleh *Tribunnews.com* dalam berita adalah “Keagamaan”, dalam artian universal, acara keagamaan disini jelas-jelas memiliki makna yang plural. Terlebih agama di Indonesia yang majemuk menjadikan kata “Keagamaan” bersifat mencakup seluruh agama di Indonesia yang beragam. Namun, ekspektasi nyatanya lebih sering menipu kita. Bagi pembaca yang baru membaca judul berita di atas, citra calon wakil gubernur ini bisa terbilang menjadi sosok yang begitu menghargai perbedaan keyakinan dalam beragama, di Indonesia. Kendati demikian, di Indonesia, keberagaman masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa di sisi lain sangat rawan memicu konflik dan perpecahan.⁴ Tatkala menelisik lebih jauh isi berita, sesungguhnya berita ini mengabarkan bahwa Sandi menghadiri kegiatan keagamaan yang hanya bernafaskan Islam, seperti pengajian yang berada di Cikini Menteng Jakarta Pusat dan konser Rhoma Irama yang bernada dakwah di Kalibata Jakarta Selatan. Citra lain yang berusaha ditampilkan oleh *Tribunnews.com* adalah berita di bawah ini mengenai Sandi yang menghadiri kegiatan mengaji bersama anak yatim.

⁴ Lihat Gina Lestari, “Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan SARA”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program Studi Ketahanan Gambar 1.6 Malam Sebelum Pencoblosan Sandiaga Mengaji Bersama Anak Yatim*. *Tribunnews*, 15 Februari 2017.

Gambar 1.6

Judul Berita Malam Sebelum Pencoblosan Sandiaga Mengaji Bersama Anak Yatim. Tribunnews, 15 Februari 2017.



Gambar 1.7

Judul Berita Ahok Ingatkan Pejabat Pemprov: Pilih Orang Berdasarkan Agama Melawan Konstitusi. Tribunnews, 11 Februari 2017.



Selain itu, memanasnya politik Indonesia saat Pilgub DKI Jakarta memicu mencuatnya berbagai statement-statement elite politik Pilkada DKI Jakarta yang bernada SARA. Berita *Tribunnews.com* yang dipublikasikan pada tanggal 11 Februari 2017 ini adalah tanggapan Ahok mengenai memilih pemimpin yang dilandaskan pada agama merupakan hal yang melawan konstitusi Negara Indonesia. Terlepas dari konstitusi Negara Indonesia itu sendiri, sesungguhnya, jika dibaca dalam isi berita lebih lanjut, Ahok sama sekali tidak mengatakan ini adalah sebuah imbauan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, ataupun mengkaitkan tanggapannya dengan Pemprov. Di sini, dapat dikatakan bahwa wartawan atau *Tribunnews.com* memiliki otoriter dalam penulisan beritanya, memiliki otoriter terhadap sasaran berita yang dikaitkan pada sumbernya atau partisipan beritanya.

Dalam berita ini Ahok mengatakan bahwa seharusnya memilih pemimpin tidak dilihat dari latar belakang agamanya. Ahok juga menambahkan bahwa setiap pemilih pasti memiliki hati nurani. Kendati demikian, dalam tanggapan Ahok, ia juga tidak lantas menjadikan ini sebagai sebuah keharusan, ia menambahkan bahwa ia juga tidak melarang jika setiap pemilih menjatuhkan pilihan pemimpinnya dengan berdasarkan latar belakang agamanya. Menurutnya, pengangkatan jabatan seseorang tidak didasari karena agama yang sama atau faktor kedekatan politik.

Berita mengenai hal ini kemudian membuat Ketua Ormas Muhammadiyah angkat bicara. Haedar Nashir dalam berita yang

dipublikasikan pada tanggal 14 Februari ini begitu jelas meluncurkan statement yang bertentangan terhadap apa yang dikatakan Ahok.

Gambar 1.8

Judul Berita *Ketua Muhammadiyah Tegaskan Memilih Berdasarkan Agama Sejalan Dengan Konstitusi*. Tribunnews, 14 Februari 2017.



Menurutnya, memilih pemimpin berdasarkan agamanya tidaklah menyalahi konstitusi. Dasar dari statementnya adalah pada pembukaan konstitusi yang mana terdapat kalimat “*Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa*” dalam pasal 29, yang tertulis bahwa rakyat bebas menjalankan ajaran agamanya. Haedar juga mengatakan selama masyarakat memiliki pijakan dalam berbangsa dan beragama, konstitusi dasar itu tidak bertentangan, melainkan sejalan.

Sesungguhnya, dari pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa ideologi Negara Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu segala kegiatan di Negara Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konstitusi menempatkan hal ini bersifat mutlak dan harus

dipatuhi oleh setiap warga dan setiap elemen bangsa Indonesia. Prinsip ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 merupakan wujud dari pengakuan keagamaan, yang berarti setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agama yang warganya anggap benar. Meski dalam ajaran Islam seorang Muslim memang dianjurkan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan agama Islam, namun di Indonesia, dengan latar belakang Negara yang pluralis yang tidak hanya agama Islam di dalamnya, yang mana hal tersebut sudah ada sejak dulu dan diakui oleh para pendiri bangsa (*founding father*), maka konstitusi Indonesia menempatkan setiap warga Negara memiliki hak yang sama, termasuk dalam hal memilih pemimpin.

Gambar 1.9

Judul Berita *Forum Mushola dan Masjid se DKI Jakarta Deklarasikan Dukungan untuk Anies-Sandi*. Tribunnews, 4 Februari 2017.



Dalam analisis hubungan atau relasi menurut Faiclough, jika media diposisikan sebagai ruang sosial di mana masing-masing kelompok yang berada dalam masyarakat saling memberikan ide dan gagasan, kemudian memperebutkan posisi yang memiliki pengaruh supaya diterima oleh publik, maka analisis relasi akan memberikan informasi yang berharga dengan cara bagaimana berbagai kekuatan sosial ditampilkan dalam teks wacana. Kelompok yang memiliki posisi tinggi, umumnya ditempatkan lebih tinggi dalam relasi hubungan dengan wartawan dibandingkan dengan kelompok minoritas.

Dalam berita ini, tanpa melewati sebuah analisis mendalam pun, publik telah mengetahui bagaimana dikotomi pertarungan politik dalam Pilgub DKI Jakarta. Ahok yang notabene non Muslim dibandingkan lawan politiknya yang Muslim, dari segi dukungan dan kelompok-kelompok

yang tutur mensukseskan kemenangan jelas kalah telak jika dukungan tersebut berlandaskan pada agama yang sama. Islam adalah agama yang mendominasi di Indonesia dan paling banyak pemeluknya.

Gambar 1.10

**Judul Berita Hasil Pilkada DKI Jakarta Menurut Media Asing.
Tribunnews, 16 Februari 2017.**



Persaingan antara Basuki Tjahaja Purnama alias **Ahok** melawan dua lawan politiknya yang beragama Islam, menurut **CNN**, menimbulkan pertanyaan apakah negeri berpenduduk Muslim terbanyak di dunia masih berpandangan moderat?

Pilgub DKI Jakarta 2017 telah menyita perhatian sebagian besar khalayak dari penjuru dunia. Berbagai media-media Internasional meyakini bahwa Pilgub DKI Jakarta 2017 adalah sebuah ujian bagi toleransi beragama dan pluralisme di Indonesia. Berita di atas menjelaskan bahwa salah dua media Internasional harian liberal kiri Amerika Serikat, dan New York Times, menyampaikan bahwa Pilgub DKI Jakarta putaran kedua akan menjadi ujian perihal sisi toleransi di Indonesia.

Dalam berita ini, *Tribunnews.com* mengutip hasil berita dari media lain yang kemudian dijadikan sebagai berita ulang. Terlihat

Tribunnews.com menampilkan beberapa pendapat ataupun tanggapan dari beragam sumber dari media rujukan. Fairclough dalam hal ini melihat dari segi teks yang di produksi pada konteks representasi dalam rangkaian kalimat. Menurutnya, memposisikan susunan kalimat dalam teks berita secara implisit akan menunjukkan praktik yang ingin disampaikan oleh wartawan. Dalam hal ini *Tribunnews.com* ingin menampilkan pendapat dari media-media asing mengenai Pilgub DKI Jakarta. Pengutipan pandangan dari media asing ini dapat dideteksi, apakah wartawan ingin menampilkan pendapat media asing sebagai ide yang dominan, ataukah pendapat media asing tentang Pilgub DKI Jakarta untuk memperkuat pendapat *Tribunnews.com*?

Caranya dengan mengetahui susunan kalimat dalam berita ini. *Pertama*, jika *Tribunnews.com* ingin menempatkan pendapat media asing sebagai ide yang dominan, maka ia akan mengutip atau mengambil tanggapan-tanggapan yang dapat memperkuat argumentasi yang dikemukakan oleh media asing. Atau yang *kedua*, *Tribunnews.com* akan menampilkan argumentasi yang justru sebaliknya.

Argumentasi utama dan lebih awal muncul adalah argumen dari harian liberal kiri Amerika Serikat tentang Pilgub DKI Jakarta adalah ujian besar tentang toleransi beragama di Indonesia. Kemudian hal ini diperkuat dengan kutipan lainnya yang mengatakan bahwa kampanye pemilihan gubernur dibayang-bayangi oleh isu agama dan ras yang jarang disaksikan

dalam pemilihan kepada daerah sebelumnya pada era demokrasi di Indonesia.

Argumentasi lain kemudian diperkuat oleh media Jerman, ARD. Mengatakan bahwa pengadilan kasus dugaan penistaan agama terhadap gubernur yang beragama kristen (minoritas di Indonesia) di Jakarta bersangkutan dengan pengaruh penganut radikal yang arah geraknya semakin meluas. ARD juga mengatakan, pemilihan gubernur di Jakarta juga menjadi ujian ihwal toleransi di Negara Indonesia khususnya. Kemudian pada harian Singapura The Straits Times, yang lebih menyoroti perang *proxy* antara tiga tokoh politik terkuat di Indonesia, yang kemudian muncul asumsi bahwa PILKADA Jakarta dinilai sebagai perang *proxy* untuk pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Gambar 1.11

Judul Berita Pengamat: PKB dan PPP Berpotensi Gabung ke Ahok-Djarot, PAN Terganjil Amien. Tribunnws, 16 Februari 2017.



Dengan bergabungnya partai berbasis Islam ke kubu Ahok-Djarot akan memperbaiki citra Ahok di mata para pemilih Islam.

Berita yang di tulis *Tribunnws.com* ini adalah mengenai tanggapan Yunarto Wijaya Direktur Charta Politika mengenai salah dua partai politik di Indonesia yang digadang-gadang akan bertendensi memberikan dukungannya kepada calon gubernur nomor 1 (Ahok-Djarot). Argumentasi yang dikemukakan Yunarto Wijaya dalam pemberitaan *Tribunnws.com* di atas jelas menggambarkan betapa sentimen-sentimen terhadap agama begitu sulit dibendung dalam kontestasi Pilkada ini. Masyarakat dibawa pada pemahaman yang mendikotomi suatu kelompok-kelompok. Kelompok mayoritas dan minoritas di Indonesia dijadikan sebagai landasan pengkotak-kotakan suatu golongan.

Di sini, *Tribunnews.com* juga menyuarakan isu SARA dalam pemberitaan ini. Bahwa khalayak digiring untuk lebih meyakini bahwa Pilgub DKI Jakarta tengah berperang politik antara umat Islam (Muslim) dan Non Muslim. Bahwa terdapat kubu yang memerangi Ahok sebab perbedaan agamanya.

Dalam berita ini, *Tribunnews.com* menampilkan sumber berita secara langsung (*direct discourse*). Dapat dikatakan demikian karena jelas terlihat pada judulnya. Menurut Fairclough, pemilihan kutipan antara langsung atau tidak langsung bukanlah semata-mata persoalan teknis jurnalistik, sebab pilihan mana yang diambil menggambarkan strategi bagaimana wartawan memposisikan dirinya dalam wacana. Fairclough menyebut ini sebagai ‘Paradoks’ suatu berita. Fairclough juga menegaskan, sumber berita yang merupakan asumsi dari sebuah peristiwa yang terjadi pada dasarnya tidak berbicara secara langsung kepada khalayak, tetapi melalui wartawan. Maka seorang wartawan kemudian yang menentukan dan memilah-milah informasi yang diudarkan.

Kemudian yang juga dapat disoroti dalam berita ini adalah tidak ditemukannya *cover both side* pemberitaan ini. Seharusnya partisipan dalam berita ditambahkan dari kedua partai tersebut. Karena memberikan porsi yang sama dalam pemberitaan membuat pembaca dapat menimbang dan memutuskan kebenaran.

Sementara berita ini dimuat *Tribunnews.com* pada tanggal 16 Februari 2017. Perlu diketahui sebelumnya, *Tribunnews.com* juga me-*release* berita lain yang senada pada tanggal 9 Februari 2017. Berita tersebut mengenai PKB Jakarta Selatan yang terbentuk dalam simpul relawan ‘Jakarta Bangkit’ untuk memberikan dukungan kepada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Simpul relawan yang sengaja dibentuk PKB Jakarta Selatan ini mendeklarasikan secara resmi keberpihakannya pada pasangan calon gubernur nomor 3 (Anies-Sandi).

Gambar 1.12

Judul Berita *PKB Jakarta Selatan Deklarasikan Dukungan Untuk Anies-Sandi*. *Tribunnews*, 9 Februari 2017.



Yang menarik dalam hal ini adalah, diketahui beberapa waktu sebelum itu, PKB secara resmi menyatakan dukungannya kepada pasangan Agus Harimurti dan Sylviana Murni. Dalam berita yang dipublikasikan *Tribunnews.com* pada tanggal 9 Februari di atas juga

mengemukakan hal yang sama. Terdapat ketidaksinergian antara PKB dan Dewan Perwakilan Wilayahnya (DPW) di Jakarta Selatan. Di satu sisi PKB telah mendukung AHY dan Sylvi, di lain sisi anggotanya membentuk kelompok tandingan untuk mendukung Anies dan Sandi.

Mari kita telisik lebih dalam terkait rentan waktu dan isi berita pada kedua berita ini. Berita yang berjudul "*Pengamat: PKB dan PPP Berpotensi Gabung ke Ahok-Djarot, PAN Terganjil Amien*" adalah berita yang di publikasikan tertanggal 16 Februari 2017, sedangkan judul berita "*PKB Jakarta Selatan Deklarasikan Dukungan Untuk Anies-Sandi*" adalah berita yang dimuat jauh sebelum berita pertama tadi. Berita tanggal 16 Februari menyatakan bahwa PKB belum memiliki kecenderungan menjauhkan dukungan kepada siapa, namun sebelum itu tanggal 9 Februari telah dimuat berita yang memuat deklarasi PKB tentang dukungannya kepada Anies-Sandi yang sebelumnya juga telah mendeklarasikan dukungan juga terhadap Agus dan Sylvi.

Tribunnews.com terkesan tidak konsisten dalam pemberitaan dalam hal ini. Terlihat tidak sinkronnya isi pemberitaan satu dan yang lainnya. Salah satu karakteristik media *online* yang bersifat aktualitas terkadang justru menjadi hal yang dikhawatirkan pembaca. Tidak hanya itu, akurasi dalam pemberitaan di media *online* juga seringkali terabaikan.

Karena mengutamakan kecepatan, berita yang dimuat di media *online* cenderung tidak seakurat media cetak.⁵

⁵ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online Kiat Blogger, Teknik SEO, Metode Kerja Citizen Journalism*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018) hlm, 38.

Gambar 1.13

Judul Berita *Wakil Ketua MUI Sebut Pendapat Ahok Soal Memilih Berdasarkan Agama Langgar Konstitusi Berbahaya. Tribunnews, 14 Februari 2017.*



Dalam relasi yang dimaksudkan Fairclough, berita yang diluncurkan *Tribunnews.com* ini adalah berita tentang tanggapan Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa'adi terhadap pernyataan Ahok mengenai memilih pemimpin berdasarkan agama adalah melanggar konstitusi, pada Sabtu 11 Februari lalu. Berita ini menyampaikan penolakan terhadap argumentasi Ahok setelah berita penolakan serupa disampaikan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir. Dalam berita ini, Zainut Tauhid menyatakan bahwa argumentasi Ahok tidak paham konstitusi Negara. Ia juga menyangkan pernyataan Ahok yang disampaikan, ia juga menambahkan bahwa seharusnya Ahok sebagai pejabat Negara harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapat. Berita ini tidak hanya mengkritisi pernyataan Ahok, tetapi juga sebuah kritik tajam mengenai

perilaku Ahok yang menurut Zainut Tauhid terkesan tidak berhati-hati dalam menyampaikan pendapat.

Dalam representasi wacana (*discourse representation*) Norman Fairclough, *Tribunnews.com* dalam hal ini menggambarkan sebuah perlawanan dari kubu Ahok dan lawannya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa MUI cenderung bertentangan dengan Ahok terlebih mengenai kasus dugaan penistaan agama. Hingga kemudian MUI mengeluarkan pernyataan dan sikap keagamaan yang membenarkan hal itu. Lebih lanjut, Front Pembela Islam (FPI) yang sejak awal telah berseteru dengan Ahok, kemudian berinisiatif melakukan konsolidasi dengan berbagai tokoh dan ormas Islam se-Indonesia untuk membuat sebuah gerakan yang diberi nama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI).

Analisis tentang konstruksi hubungan dalam berita menurut Fairclough sangat penting dan signifikan terutama jika dihubungkan dengan konteks sosial.⁶ Jika media adalah ruang sosial seperti apa yang dikatakan Fairclough, di mana masing-masing kelompok di hadapan masyarakat saling memberikan pendapat dan asumsi yang beragam, maka analisis hubungan atau relasi ini akan menampilkan informasi yang berharga tentang bagaimana kekuatan dalam teks. Berita di atas menyangkut dua pihak sebagai partisipan yang diberitakan; yaitu pihak MUI yang diwakili oleh Zainut Tauhid yang menanggapi pernyataan, dan

⁶ Lihat Ariyanto, hlm. 301.

Ahok yang sebelumnya mengeluarkan pernyataan, yang kemudian ditanggapi.

Di sini kita bisa melihat bagaimana berita itu dibentuk. Dalam kalimat pertama, wartawan menuliskan “*Tidak betul memilih pemimpin berdasarkan pertimbangan agama dianggap melanggar konstitusi.*” Ini adalah pendapat narasumber Zainut Tauhid yang bertentangan dengan pernyataan Ahok sebelumnya. Wartawan menjadikan ini sebagai gagasan pokok berita yang seakan menunjukkan penolakan keras terhadap pernyataan Ahok. Pada kalimat kedua wartawan baru menjelaskan bahwa hal tersebut adalah pernyataan dan sikap MUI. Dalam berita ini bukan hanya menggambarkan bentuk-bentuk penolakan terhadap pernyataan Ahok ataupun argumentasi penolakan, tetapi juga menempatkan khalayak sebagai posisi yang dibuat bingung oleh media. Sebab banyaknya argumentasi dan pernyataan elite politik yang saling bertentangan dan terkesan menimbulkan perlawanan terhadap kubu yang sudah diciptakan. Elite politik semakin gencar berebut perhatian khalayak untuk menunjukkan bahwa ia yang paling benar. Bahwa setiap argumentasi kubu lawan selalu tidak tepat.

Bagi khalayak, dalam melihat berdebatan antara kedua kubu ini, seharusnya tidak terburu-buru mengambil kesimpulan pada setiap apa yang diberitakan. Sebab karakteristik media *online* yang dituntut *update* dengan cepat, membuat media—*Tribunnews.com* tidak pernah tuntas dalam pemberitaannya, jarang menyajikan berita yang utuh dan

berimbang, informasi yang terputus-putus, dan akurasi yang tidak menutup kemungkinan terabaikan. Bayangkan ketika khalayak hanya membaca satu angle dalam berita ini, pertanyaan Ahok misalnya. Khalayak tidak akan tau bagaimana tanggapan elite politik lainnya terhadap pernyataan tersebut, tidak akan mengetahui beragam perpektif mengenai hal itu, dan khalayak akan berpotensi menyimpulkan dengan cepat.

Gambar 1.14

**Judul Berita *Djarot Diusir Saat Hadiri Acara Dzikir dan Shalawat.*
Tribunnews, 12 Maret 2017.**



Dari beragam isu SARA di Indonesia yang salah satunya dilakukan untuk mendiskriminasi kelompok tertentu, kasus Djarot dalam berita ini hanya salah satu dari sekian banyak yang pernah terjadi di Indonesia. Hawa panas pemilihan gubernur Jakarta ini semakin terasa. Tatkala semakin gencarnya konflik-konflik sosial yang semakin marak terjadi, ditambah persoalan agama dan etnis yang sensitif menjadikan konflik semakin multiperspektif dan rumit sekali.

Tribunnews.com mempublikasi berita ini hanya berisikan tiga kalimat sebagai bagian berita yang utuh. Isi berita ini adalah bahasa wartawan kepada khalayak yang mewartakan peristiwa pengusiran Djarot pada acara keagamaan dzikir dan shalawat. Tidak ada partisipan di dalam berita, maka berita ini tidak dapat dikatakan memiliki akurasi atau memiliki porsi partisipan yang baik. Meskipun, dalam berita terlihat

Tribunnews.com memberikan kolom video untuk ditonton khalayak, maka dapat dikatakan khalayak akan lebih berpotensi untuk membaca teks dari pada meng-klik tombol putar video untuk mengetahui berita lebih lanjut.

Dalam istilah jurnalistik juga terkandung makna sebagai suatu seni, atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi secara indah agar dapat diminati dan dinikmati, yang kemudian membawa manfaat bagi khalayak.

Pada paragraf pertama, yang mengatakan ini bukanlah kasus pertama yang dialami Djarot, “*Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat kembali mengalami penolakan.*” Seharusnya *Tribunnews.com* sedikit menyinggung peristiwa tersebut sebelum menjelaskan bagaimana kronologi kejadian penolakan. Dan nyatanya pun dalam berita yang berisi tiga kalimat ini tidak menjelaskan apapun kronolohi penolakan yang terjadi. Partisipan berita atau narasumber yang seharusnya ada dalam berita, tidak ditampilkan oleh *Tribunnews.com*. Jelas, hal tersebut tidak dapat dikatakan berita yang memiliki komposisi yang pas untuk ukuran sebuah berita.

Gambar 1.15

Judul Berita *Djarot Pakai Peci dalam Surat Suara, Anies: Saya Malah Heran yang Satu Kok Nggak Pakai Ya*. Tribunnnews, 23 Maret 2017.



Dalam berita, Fairclough mengatakan bahwa wartawan sesungguhnya tidak pernah berbicara atau menyampaikan atas dirinya sendiri kepada khalayak. Wartawan selalu berhadapan dengan beragam pandangan, suara-suara, dan ide yang harus ia tampilkan. Selibuhnya, wartawan yang akan menentukan mana sudut pandang yang akan ia pilih, ataupun informasi mana yang akan ia jadikan fokus utama dalam berita. Di sini, analisis terkait intertekstualitas dalam berita di atas terdeteksi penggunaan *direct discourse* (secara langsung) pada judul berita. Suara orang lain (Anies Baswedan) secara eksplisit ditampilkan apa adanya lewat kutipan. Namun, dalam catatan Fairclough, sering kali terjadi ambiguitas dalam bahasa. Misalnya di satu sisi teks menampilkan suara wartawan, di sisi lain menampilkan suara atau teks lain di luar dirinya.

Tribunnews.com ternyata mengamini bahwa wacana yang berkembang adalah politik yang seharusnya menghibur, peristiwa harusnya ditransformasikan ke dalam kodifikasi populer dan enak dibaca oleh khalayak. Oleh sebab itu bahasa yang dipakai dalam berita merupakan bahasa informal, tidak baku, bahasa sehari-hari. Sedangkan kumpulan kata yang terdapat dalam kalimat pertama dalam judul berita adalah suara dari wartawan. Kata Fairclough, politik itu seperti permainan, istilah-istilah teknis dihilangkan menjadi istilah yang akrab dengan dunia populer keseharian.

Dalam hal ini, penggunaan bahasa informal dalam berita khususnya pada judul berita, memiliki potensi lebih besar menarik minat pembaca atau khalayak terhadap berita. Terlebih, khalayak selama ini telah banyak mengetahui bahwa berita-berita politik yang notabene ditulis dengan format berita *hardnews* yang memiliki karakteristik kaku dan baku, khalayak menganggapnya suatu hal yang umum, biasa yang lumrah. Namun, dengan menggunakan bahasa-bahasa informal yang populer, kadar penasaran khalayak terhadap berita menjadi semakin besar, terlebih topik beritanya yang pada saat itu sedang banyak mendapatkan sorotan.

Berbicara mengenai peci sebagai objek dalam berita ini, peci selama ini diyakini menjadi hal yang mewakili kebangsaan dan nilai nasionalisme di Indonesia. Peci secara umum adalah istilah lain dari penutup kepala yang digunakan oleh umat Islam laki-laki di acara-acara keagamaan ataupun acara resmi lainnya. Peci sebagai sebuah penutup

kepala bagi umat Islam di Indonesia melalui sejarah yang sangat panjang, dari sebuah nilai yang mengandung unsur keagamaan menjadi nilai ideologi berbangsa. Peci memasuki wilayah simbolis para pemimpin Indonesia, dalam sejarah perjalanan bangsa dan sejarah. Bagaimana istilah Peci menjadi sebuah “Visual bergerak” guna melambangkan atau menandakan bahwa pemakaiannya adalah seorang pemimpin yang nasionalis sekaligus agamis. Peci ini pertama kali dipopulerkan oleh presiden pertama Republik Indonesia yaitu Soekarno. Sejak saat itu, Peci disebut simbol atau lambang nasionalisme di Indonesia.

Dalam tradisi Islam yang banyak diketahui masyarakat, Peci adalah pilihan cara berpakaian yang khas beberapa umat muslim di Indonesia. Selain berfungsi sebagai penutup kepala, peci diyakini merupakan sunnah nabi, dan umat Islam beranggapan bahwa menggunakan penutup kepala menandakan mereka mencintai nabinya. Bahkan dijumpai beberapa umat Islam juga menganggap kebiasaan tidak menutup kepala, tanpa peci atau surban adalah salah satu kebiasaan orang di luar Islam.⁷

Dilihat dari topik berita yang *Tribunnews.com* wartakan, berita ini bisa saja menjadi pemicu agar semakin memanasnya perlawanan dalam kontestasi pilgub ini. Ahok yang Non Muslim disini terkesan didiskriminasi oleh sekelompok kaum mayoritas. Sebab perbedaan

⁷ Lihat Rama Kertamukti, “Komunikasi Simbol: Peci dan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Komunikasi FISHUM Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 6, No. 1, April 2013.

tersebut, dijadikan kubu lawan untuk menyerang Ahok dari berbagai penjuru permasalahan, mulai dari Ahok yang tidak memakai peci di kertas suara, berbedanya agama dan etnis, tidak samanya tradisi-tradisi kaum mayoritas di Indonesia dan lain sebagainya. Maka *Tribunnews.com* secara tidak langsung melakukan diskriminasi terhadap Ahok yang kaum mayoritas di Indonesia melalui berita ini. Ditambah lagi pendapat Anies sebagai partisipan dalam berita (narasumber), yang menyuarakan betapa berbedanya Ahok dengan kaum mayoritas di Indonesia dan mencitrakan kepada khalayak bahwa seorang pemimpin yang baik haruslah yang mencerminkan nilai-nilai nasionalisme dengan salah satunya mentradisikan atau membudayakan memakai peci.

Selain itu, *Tribunnews.com* dalam hal ini secara tidak langsung memberikan citra kepada Anies sikap intoleransinya terhadap Ahok (kaum minoritas) dalam berita tersebut.

Gambar 1.16

Judul Berita Menag: Rumah Ibadah Jangan Dijadikan Pemicu Konflik Sesama Muslim. Tribunnews, 13 Maret 2017.



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyanggah beredarnya spanduk di masjid yang menolak untuk mensalatkan jenazah yang memiliki perbedaan pilihan politik.

Lukman menegaskan jangan menjadikan rumah ibadah sebagai tempat untuk memunculkan konflik atau perselisihan sesama umat Muslim lantaran perbedaan politik.

Jika kita amati dalam berita ini dan berita-berita *Tribunnews.com* yang memiliki format yang sama dalam penulisan, unsur-unsur dalam berita yang selama ini mengharuskan untuk ada, semakin banyak yang mulai hilang. 5W1H (*What, Who, When, Where, Why, How*) dalam berita terkesan masih samar-samar. Karena teks yang dianggap berita, ini sesungguhnya hanya menampilkan atau mewartakan argumen dari Menteri

Agama Lukman Hakim Saifuddin yang menanggapi spanduk-spanduk SARA yang beberapa waktu lalu mulai beredar diberbagai masjid di Jakarta. Alih-alih hanya menampilkan satu partisipan, berita ini terkesan sebagai informasi pendukung berita sebelumnya.

Dalam aspek relasi menurut Fairclough, *Tribunnews.com* mengidentifikasi dirinya atau memposisikan dirinya berada dipihak narasumber yang menyayangkan beredarnya spanduk SARA yang dapat menimbulkan konflik sosial di Jakarta. Kendati berita di atas juga bersifat himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Jakarta, disini wartawan atau *Tribunnews.com* juga menjadi pihak yang turut menghimbau untuk tidak menjadikan rumah ibadah sebagai tempat memunculkan konflik dan perselisihan sesama umat muslim hanya karena perbedaan politik. Maka, teks berita di atas dibuat setelah interpretasi wartawan kemudian disusul argumentasi yang menguatkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim.

Kendati demikian, Dewan Masjid Indonesia (DMI) juga sempat menyampaikan tujuh poin mengenai kampanye hitam dan tindakan-tindakan yang tidak berperikemanusiaan yang dikarenakan perbedaan pilihan politik:

Pertama, bahwa sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Al-Sunnah Al-Nabawiyah, syari'at Islamiyah telah dengan jelas dan tegas menetapkan kewajiban dan hak syar'i antara sesama muslim yang hidup maupun

antara yang hidup dan yang meninggal dunia. Kedua, mensalatkan janazah saudara sesama muslim adalah kewajiban syar'i bagi yang hidup dan hak syar'i bagi janazah untuk disalatkan. Ketiga, bagi orang yang sehat dalam suatu lingkup masyarakat telah ditetapkan kewajiban syar'i yang harus dijalankan yaitu menjenguk saudaranya yang sedang sakit, sementara yang sedang sakit memiliki hak syar'i untuk dijenguk oleh yang sehat. Keempat, jika kewajiban syar'i ini dengan sengaja ditinggalkan, maka berdosa seluruh umat dalam lingkungan masyarakat. Kelima, laknat Allah bagi para penganjurnya dan orang-orang yang mengikuti karena dengan sengaja menyelisih ketentuan Syari'at Islamiyah. Keenam, seseorang bisa kehilangan hak syar'inya apabila secara sengaja dan terang-terangan menyatakan kekafirannya atau permusuhannya terhadap sesama dan terhadap Islam. Ketujuh, karena itu Dewan Masjid Indonesia menyerukan segenap umat untuk menunaikan kewajiban dan hak syar'i sesama umat sesuai tuntunan syari'at Islam.

Gambar 1.17

**Judul Berita PKB DKI: Upaya Menggerus Tradisi Islam Ahlus Sunnah.
Tribunnews, 11 Maret 2017.**



Ilyas mengatakan pihaknya melihat ada upaya sekelompok orang yang ingin menggerus tradisi Islam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah di Jakarta.

"Jakarta hari ini sangat bahaya dan ada upaya-upaya untuk tradisi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah tergerus," ujar Ilyas dalam acara yang digelar di Cempaka Putih, Jakarta, Sabtu (11/3/2017).

Bahkan, kata Ilyas, upaya dari sekelompok orang yang berupaya menggerus tradisi itu dengan cara 'berkamufase' sebagai kelompok yang justru mengatasnamakan Islam yang memiliki tradisi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.

Intertekstualitas dalam berita ini menggunakan suara sumber berita (narasumber yang diwawancarai dalam berita), yang kemudian dijadikan berita secara langsung (*direct discourse*). Hal ini dilakukan

Tribunnews.com kala menggunakan argumentasi Ilyas pada paragraf kedua, sebagai narasumber dalam berita. Pilgub DKI Jakarta 2017 selain persoalan etnis yang ada di Indonesia dijadikan bahan untuk saling menyerang kepada orang yang dianggap lawan, yang tidak kalah juga adalah persoalan agama dan kelompok-kelompok agama tertentu. Di sini, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia tentu dijadikan sorotan yang cukup sentral, terlebih dalam umat Islam di Indonesia memiliki golongan-golongan tertentu seperti Organisasi Masyarakat (Ormas). Ormas-ormas seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan lain sebagainya mau tidak mau menjadi bidikan wartawan dan media-media yang lain yang juga turut serta memberikan pendapat.

Tidak menafikkan bahwa hal ini juga turut mempengaruhi dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rumitnya persoalan di Pilgub DKI Jakarta. Bagaimana tidak, setiap golongan memiliki fatwa-fatwa dan ketentuannya masing-masing, memiliki kebenaran masing-masing, dan memiliki cara masing-masing menyikapi Pilgub DKI Jakarta yang bernuansa SARA. Setiap pernyataan dan argumentasi selalu mengalami perdebatan. Maka dapat dikatakan persoalan SARA pada Pilgub DKI Jakarta akan tetap dan terus berlanjut sampai ditentukannya siapa yang terpilih menjadi pemimpin. Pun hal tersebut juga tidak dapat dijadikan jaminan untuk mengurangi panasnya tensi politik pada waktu itu atau menyudahi banyaknya perdebatan dari berbagai kalangan.

Gambar 1.18

Judul Berita Soal Pilgub DKI, Ketua PBNU: Tuhan kok Diajak Kampanye!. Tribunnews, 14 Maret 2017.



Berita ini menjelaskan ketidaksepakatan Ketua PBNU Aqil Siraj terhadap peristiwa sepanduk SARA yang banyak beredar di Jakarta. Menurutnya, tidak sepatasnya warga Jakarta mencampuradukkan persoalan politik dengan agama. Terlebih oknum-oknum yang melakukan hal tersebut adalah yang beragama Islam. Tentu hal ini juga dianggap mencederai Islam, wajah Islam semakin suram di mata dunia dengan aksi-askinya yang bersifat provokatif, diskriminatif dan intimidasi terhadap kelompok lain yang minoritas. *Tribunnews.com* mewartakan hal ini terkesan semacam permusuhan saudara sesama umat Islam. Dalam posisi ini, kita ketahui bersama bahwa Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) adalah ormas Islam yang memiliki penganut terbesar di Indonesia, tidak hanya itu PBNU juga menjadi ormas yang konsisten menangani problematika hukum Islam dan menjunjung tinggi Islam moderat.

Gambar 1.19

Judul Berita *Tanggapi Penolakan Warga Mengurus Jenazah Sesama Muslim, Ini Tujuh Poin Sikap Dewan Masjid Indonesia. Tribunnews, 12 Maret 2017.*



Tujuh poin yang disampaikan DMI adalah sebagai berikut.

1. Bahwa sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Al-Sunnah Al-Nabawiyah, syari'at Islamiyah telah dengan jelas dan tegas menetapkan kewajiban dan hak syar'i antara sesama muslim yang hidup maupun antara yang hidup dan yang meninggal dunia.
2. Bagi orang yang sehat dalam suatu lingkungan masyarakat/kampung telah ditetapkan kewajiban syar'i yang harus ditunaikan yaitu menjenguk saudaranya yang sedang sakit, sementara yang sedang sakit memiliki hak syar'i untuk dijenguk oleh yang sehat.
3. Selanjutnya, mensalatkan janazah saudara sesama muslim adalah kewajiban syar'i bagi yang hidup dan hak syar'i bagi janazah untuk dishalatkan.

4. Jika kewajiban syar'i ini dengan sengaja ditinggalkan, maka berdosa seluruh umat dalam lingkungan masyarakat/kampung itu;
5. Begitu pula laknat Allah lah bagi para penganjurnya dan orang-orang yang mengikuti karena dengan sengaja menyelisihi ketentuan Syari'at Islamiyah.
6. Seseorang bisa kehilangan hak syar'inya apabila secara sengaja dan terang-terangan menyatakan kekafirannya atau permusuhannya secara terus-menerus terhadap Islam;
7. Karena itu Dewan Masjid Indonesia menyerukan segenap umat untuk menunaikan kewajiban dan hak syar'i sesama umat sesuai tuntunan syari'at Islam.

Mengikuti sandiwara politik yang berbalut SARA ternyata bukan hanya menjenuhkan tetapi juga menguji seluruh manusia untuk bersikap bijaksana. Kedati pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 telah menarik tidak hanya warga Jakarta tapi juga warga di luar Jakarta, kontestasi ini juga telah banyak menorehkan duka terhadap matinya rasa kemanusiaan yang ada di Indonesia, khususnya Jakarta. Berita ini berisi tujuh poin yang disampaikan Dewan Masjid Indonesia (DMI). Hal ini disampaikan sebagai sikap yang diambil DMI atas penolakan warga untuk mengurus jenazah seorang muslim yang mendukung terdakwa kasus dugaan penistaan agama.

Dalam hubungan relasi, berita ini tidak menampilkan narasumber, wartawan hanya mengutip pernyataan dari pihak DMI yang diwakili

sekretaris jendralnya pada saat menyampaikan tujuh poin tersebut melalui media. Kutipan dari pernyataan pihak DMI tersebut ditampilkan pada kalimat ke enam dalam berita, setelah interpretasi wartawan setelah mengetahui tujuh poin dan pernyataan DMI. Di sini, *Tribunnews.com* dalam berita ini berusaha untuk menginterpretasikan berita tersebut kemudian mengutip pernyataan dari partisipan berita sebagai pendukung dari interpretasinya. Mengapa? Karena interpretasi wartawan atau media ditampilkan terlebih dahulu sebelum pernyataan sesungguhnya. Khalayak dibuat memahami interpretasi media terlebih dahulu kemudian baru didukung oleh pernyataan partisipan berita.

Dalam berita, sesungguhnya bukanlah fakta, apa yang tertuang di dalamnya adalah interpretasi wartawan terhadap suatu kejadian fakta. Maka, wartawan selalu memiliki otoriter menentukan interpretasi seperti apa yang ingin ditampilkan kepada pembacanya (khalayak) dalam berita yang ditulisnya. Fairclough juga berpendapat, bahwa dalam berita, salah satu mengidentifikasi posisi wartawan dengan cara melihat interpretasi diletakkan sebelum atau sesudah pernyataan, pernyataan tersebut tentu dapat berupa dukungan atau pun penolakan.

Gambar 1.20

Judul Berita *Wapres JK Perintahkan Turunkan Spanduk Provokasi di Masjid*. Tribunnews, 14 Maret 2017.



Riuhnya isu SARA dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 nyatanya juga merambah ke berbagai media. Mulai dari media sosial, portal-portal online berita, dan media-media cetak lainnya. Gencarnya kampanye hitam yang diarahkan pada calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta memang sebagai upaya untuk memojokkan pihak-pihak tertentu. Terlebih, isu SARA dalam kontestasi ini menyeruak menjelang putaran kedua. Munculnya spanduk-spanduk yang bernuansa SARA dan provokatif pada Pilgub DKI Jakarta 2017 begitu meresahkan warga Jakarta. Dalam catatan penulis, terdapat seribu lebih spanduk SARA yang beredar sebagai kampanye hitam. Spanduk provokatif ini tidak lain untuk menyerang salah satu calon gubernur dan calon wakil gubernur.

Gambar 1.21

Spanduk SARA 1

Masjid Ini Tidak Mensholatkan Jenazah Pendukung Penista Agama



Gambar 1.22

Spanduk SARA 2

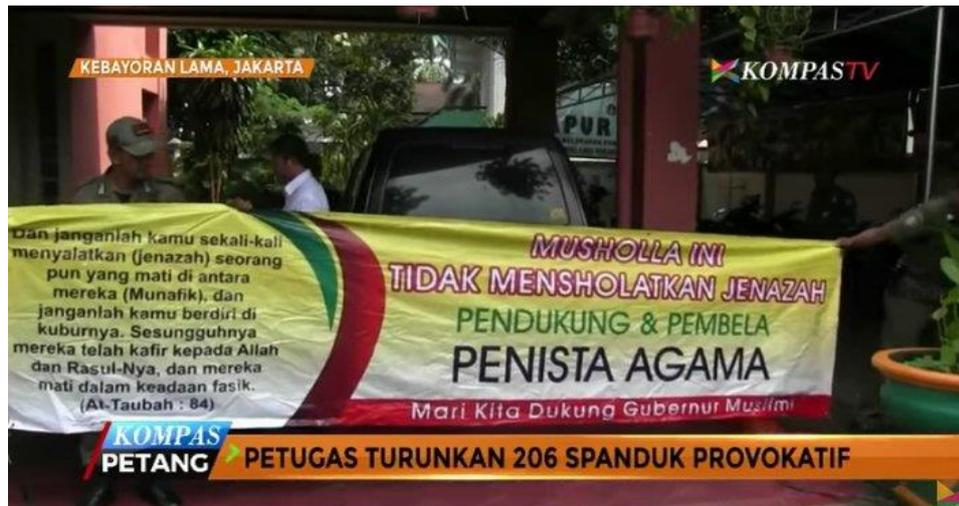
Pemakaman ini Ga Nerima Bangke Orang Munafik atau Pendukung Dan Pembela Penista Agama



Gambar 1.23

Spanduk SARA 3

*Musholla Ini Tidak Menholatkan Jenazah Pendukung & Pembela
Penista Agama*



Dalam berita ini, terlepas dari wakil presiden Jusuf Kalla menyuruh pihak-pihak yang berada di Masjid untuk menurunkan spanduk-spanduk SARA, *Tribunnews.com* menuliskan pada paragraf ke delapan bahwa spanduk-spanduk yang beredar tersebut ditujukan kepada calon gubernur nomor urut 1, Basuki Tjahya Purnama (Ahok). Kemudian, tidak ada partisipan lain selain JK dalam berita ini. Agar lebih porposional maka seharusnya ada partisipan dari pihak-pihak tertentu terkait spanduk SARA, entah dari warga setempat yang kampungnya terdapat spanduk SARA, ataupun salah satu dari Satpol PP yang turun ke lapangan sebagai petugas yang mengamankan di lapangan. Selain itu, *Tribunnews.com* menampilkan sosok JK yang begitu toleransi dalam Pilgub DKI Jakarta. Semua itu didukung oleh judul yang dipilih *Tribunnews.com* dengan menggunakan

susunan kalimat *indirect discourse* (tidak langsung) pada intertekstualitas menurut Fairclough. Judul berita ini sesungguhnya adalah perkataan tidak langsung dari JK yang dibahasakan ulang menjadi bahasa wartawan.

Dalam elemen ‘Teks’ menurut Faiclough, representasi kombinasi anak kalimat, antara satu anak kalimat dengan anak kalimat yang lainnya dapat digabungkan, sehingga membentuk suatu pengertian utuh yang dapat dimaknai.⁸ Koherensi antara anak kalimat ini pada titik tertentu menunjukkan ideologi tertentu. Selain memiliki beberapa bentuk koherensi (Elaborasi, Perpanjangan, dan Mempertinggi) analisis kombinasi anak kalimat ini menganggap bahwa realitas terbentuk lewat bahasa dan gabungan dari anak kalimat dan anak kalimat yang lain.

Dalam paragraf pertama berita ini, mari kita soroti penggunaan anak kalimat “yang” yang termasuk dalam bentuk elaborasi. Dikatakan oleh *Tribunnews.com* sebagai fakta, *beberapa masjid dijakarta diketahui memasang spanduk*, dan fakta lain spanduk tersebut *diketahui bertuliskan nada provokasi*. Dua fakta tersebut dapat ditampilkan sebagai saling berhubungan, atau ditampilkan secara terpisah. Jika fakta itu digabungkan, maka akan membuat asosiasi kepada khalayak bahwa ini adalah sebuah pelanggaran dalam proses kampanye Pilgub DKI Jakarta yang sedang berlangsung. Sebaliknya, jika dua fakta tersebut dipisah maka akan membuat asosiasi *pemasangan spanduk di masjid-masjid* itu adalah hal yang wajar sebab tidak diketahui spanduk apa yang dipasang.

⁸ Lihat Eriyanto, Hlm.294

Tabel 1.5
Tabel Analisis Fairclough Representasi Kombinasi Anak
Kalimat

Tidak ada	Beberapa masjid di Jakarta diketahui memasang spanduk.
Penjelas	Memasang spanduk yang bertuliskan nada provokasi.
Perpanjangan kontras	
Penyebab	Spanduk bertuliskan nada provokasi tersebut untuk tidak melakukan shalat jenazah bagi mereka yang mendukung pasangan calon tertentu di Pilkada DKI Jakarta.

Selain itu, Pilgub DKI Jakarta dalam berita ini memperlihatkan begitu krisis moral dalam setiap kejadian. Selain banyaknya diskriminasi pada kelompok-kelompok tertentu, provokasi dan intimidasi, banyak juga kejadian mengenai krisis kemanusiaan.

Gambar 1.24

Judul Berita Lagu 'Sang Penista', Kolaborasi Fadli Zon dan Ahmad Dhani. Tribunnews, 18 April 2017.



Fadli Zon mengatakan lagu yang dibawakan [Ahmad Dhani](#) itu merupakan sajak yang ia buat pada awal Februari lalu sebagai "ekspresi terhadap keadaan".

"Tujuannya adalah sebagai ekspresi terhadap keadaan, bagaimana kekacauan dimulai oleh sang penista...merobek kerukunan agama, mengkhianati Pancasila, merobek kebhinekaan," kata Fadli kepada BBC Indonesia.

Apapun tujuan baiknya, jika menggunakan cara yang tidak pantas tetap tidak bisa dibenarkan. Kendati bermaksud sebagai ekspresi membela kebhinekaan, ideologi Negara Indonesia "Pancasila", dan kehidupan beragama, jika melalui ujaran kebencian tetap saja tidak pantas dilakukan. Alih-alih ingin menjaga kerukunan beragama, nyatanya justru semakin

menyulut api permusuhan. Begitulah setidaknya penulis menginterpretasikan kondisi konflik saat Pilgub DKI Jakarta khususnya mengenai ujaran-ujaran kebencian yang semakin melanggeng di tengah masyarakat.

Wartawan selalu memiliki maksud dan tujuan atas setiap interpretasi kejadian yang diterima. Bahkan hingga interpretasi tersebut sampai dituangkan menjadi sebuah berita, wartawan memiliki trik tersendiri untuk menarik pembaca tenggelam dalam interpretasi yang wartawan atau media ciptakan. Sebagaimana titik perhatian besar yang Fairclough yakini bahwa ia melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Seperti juga yang kita ketahui dalam hubungan dialektik, bahasa secara sosial dan historis adalah bentuk tindakan.

Tribunnews.com dalam berita ini mengutip pendapat Fadli Zon mengenai lagu kolaborasinya dengan Ahmad Dhani “Penista Agama” dalam berita yang telah terlebih dahulu dipublikasikan portal media *online* BBC Indonesia. Dimana menurut Fairclough, kalimat pertama di atas menggunakan intertekstualitas *indirect discourse* (tidak langsung), sebab suara Fadli Zon disuarakan oleh wartawan, Fadli Zon sebenarnya tidak berbicara sebagai dirinya sendiri, yang mengatakan bahwa lagu Penista Agama menurutnya adalah ekspresi dari keadaan. Terbukti wartawan memakai kata “mengatakan” dalam kalimat tersebut. Kemudian, wartawan memperkuat interpretasinya dengan menampilkan perkataan Fadli Zon yang ia kutip dari portal media *online* BBC Indonesia. Tentu wartawan

tidak hanya asal mengutip dalam hal ini. Meskipun bukanlah hasil dari wawancaranya sendiri secara khusus, wartawan bisa saja mengutip dari media manapun asal dapat mendukung komponen berita-beritanya.

Gambar 1.25

Judul Berita Menteri Pertahanan Sebut Peserta Pilkada dan Pendukungnya Harus Ikut Bela Negara. Tribunnews, 17 April 2017.



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung sengit dan menimbulkan permasalahan SARA yang berpotensi membuat bangsa terpecah.

Menurut Fairclough, ketika teks diproduksi kemudian ditampilkan ke khalayak, pada dasarnya pemakaian bahasa dikaitkan pada paling tidak dua pilihan, kosakata (*vocabulary*) dan tata bahasa (*grammar*). Fairclough juga meyakini bahwa hal tersebut bukanlah semata-mata persoalan ketatabahasaan. Menurutnya realitas yang dihadirkan dari pemakaian bahasa dapat berhubungan dengan bagaimana seseorang, kelompok, peristiwa, dan kegiatan ditampilkan dalam teks. Kosakata di sini sangat menentukan makna teks sebab berhubungan dengan pernyataan bagaimana realitas terepresentasi melalui bahasa.

Pada kalimat pertama berita ini *Tribunnews.com* menginterpretasikan sebuah fakta dengan menggunakan kata “sengit” untuk menunjukkan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang tengah berlangsung. Kalimat ini ternyata interpretasi dari partisipan berita atau narasumber yang diwawancarai dalam berita, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Menurut Fairclough, pada setiap pemilihan kata, selalu menimbulkan asosiasi tertentu pada realitas yang diacu. Dengan pemakaian kata “sengit” dapat dibahasakan dengan kata “memanas” atau “bengis” misalnya. Dengan pemakaian kata “sengit” bermakna kejam, keras, dan berpotensi menyakiti hati. Begitupun dengan realitas yang dialami saat Pilkada DKI Jakarta 2017, seluruh nilai-nilai kemanusiaan seakan hilang, aksi-aksi keras pengecaman terhadap salah satu pasangan calon semakin terang-terangan, selain itu juga tentu merugikan banyak pihak, tidak hanya sesama kelompok tetapi juga kelompok-kelompok yang lainnya. Kemudian jika penggunaan kata “bengis” bermakna sikap yang keras kepala dan kasar. Sedangkan “memanas” bermakna menjadi panas atau berkaitan dengan tensi panas yang tinggi, menyulut-nyulut, atau bisa juga dimaknai dengan masyarakat Jakarta yang sedang mengalami kondisi panas ditengah Pilkada DKI Jakarta dengan berbagai isu SARA yang mewarnai kontestasi politik pada waktu itu.

Namun sesungguhnya, ketiga kata tersebut memiliki persamaan. Juga dapat dipakai dan diselaraskan dengan teks berita di atas.

Tabel 1.6**Tabel Analisis Fairclough (Ketatabahasaan)**

Sengit	Sengit adalah tindakan yang keras dan bersifat merugikan orang lain.
Bengis	Bengis adalah tindakan yang keras dan bersifat merugikan orang lain.
Memanas	Memanas adalah tindakan yang keras dan bersifat merugikan orang lain.

Kata “sengit” dalam teks berita di atas, juga dapat disebut ‘metafora’ dalam pandangan Fairclough. Menurutnya, pilihan pada metafora adalah kunci mutlak bagaimana realitas ditampilkan dan dibedakan dengan yang lainnya. Metafora bukan hanya persoalan keindahan literer atau mengenai ketatabahasaan semata, tetapi metafora dapat menentukan apakah realitas itu dimaknai dan dikategorikan sebagai hal positif atau negatif di mata khalayak.

Gambar 1.26

Judul Berita *Sejumlah Pengurus PPP Ingin Lengserkan Djan Faridz dan Romi Karena Mendukung Ahok-Djarot. Tribunnews, 14 April 2017.*



Segala bentuk diskriminasi dengan alasan apapun tentu tidak dibenarkan di Negara Indonesia. Mengingat lima landasan berdirinya bangsa Indonesia “Pancasila” yang tertera pada tiap-tiap butir silanya yang berjumlah 5, telah dijadikan pijakan dalam hidup berwarganegara. Apalagi ketika dalam berwarganegara adanya perbedaan justru membuat rakyat jadi terpecah belah. Dipandang dari pandangan biasa ketika membaca berita ini, adalah salah satu fenomena yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta. Sedikit demi sedikit orang-orang yang memiliki perbedaan dalam pilihan pemimpin akan segera disingkirkan dan juga yang tidak sesuai pada prinsip golongan akan segera terusir.

Dalam teks berita di atas menunjukkan praktik representasi rangkaian antar kalimat yang saling mendukung. Dapat dilihat bahwa wartawan di sini menampilkan pendapat narasumber (Ketua PPP Dewan Wilayah Yogyakarta) HM Syukri Fadholi yang didukung oleh partisipan berita lainnya (narasumber) yaitu Majelis Tinggi PPP Bachtiar Chamsy untuk melengserkan Djan Faridz dan Romahurmzy (Romi) yang baginya sudah tidak sejalan dan melanggar azas partai Islam sebab memilih Ahok-Djarot. *Tribunnews.com* di sini sama halnya dengan menampilkan lebih banyak orang yang pendapatnya senada dengan pendapat HM Syukri Fadholi. Hal ini bagi Fairclough telah menjadi salah satu faktor diketahuinya keberpihakan *Tribunnews.com* dalam pemberitaan.

Terlebih mengenai pelengseran Djan Faridz dan Romi ini adalah sebuah ketidakadilan dan pelanggaran konstitusi yang ada di Indonesia. Dalam analisis ini penulis telah menyinggung di awal bahwa dalam konstitusi Indonesia setiap warga Negara Indonesia bebas menentukan pilihannya.

Gambar 1.27

Judul Berita *Pemimpin Ormas Enam Agama Minta Jangan ada Intimidasi dan Politisasi Agama*. Tribunnews, 17 April 2017.



Pemimpin Ormas Enam Agama Minta Jangan ada Intimidasi dan Politisasi Agama

Senin, 17 April 2017 14:47 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan enam organisasi keagamaan di Indonesia memberikan seruan moral terkait semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada Jakarta pada tanggal 19 April 2017 mendatang.

Penyampaian seruan moral itu dilaksanakan di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).

Enam pimpinan organisasi keagamaan itu adalah Ketua PBNU Said Aqil Siroj, Koferenesi Waligereja Indonesia (KWI) sekaligus Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt Dr Henriette T Hutabarat-Lebang, Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia (NSI) Maha Pandita Utama Suhadi Sendjaja, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) Uung Sendana.

Mereka secara serentak menyatakan semua pihak menjaga situasi kondisi dari pra, pelaksanaan, hingga pasca Pilkada Jakarta.

Termasuk saat menjaga situasi damai saat masa tenang kampanye berlangsung.

"Mari kita semua menjaga dan menjamib masa tenang yang sedang berlangsung seraya menghindari berbagai bentuk intimidasi dan politisasi agama," ujar Uung Sendana saat membacakan satu poin dalam seruan moral tersebut.

Sementara Ketua PBNU Said Aqil Siroj meminta masyarakat untuk mempercayakan keamanan pelaksanaan Pilkada Jakarta pada panitia pelaksana, pemerintah, serta aparat keamanan.

"Kita harus tetap bersikap tenang, tidak takut, dan berpikir jernih dalam melihat situasi. Kita harus beri kepercayaan penuh kepada pemerintah untuk mensukseskan dan menjaga pelaksanaan Pilkada Jakarta," ujar Said Aqil Siroj.

Hadir pula dalam acara tersebut perwakilan dari Mabes Polri Komjen Luthfi Attamini.

Di akhir acara keenam pimpinan enam organisasi agama di Indonesia berfoto bersama sambil berpegangan tangan.⁹

Sama halnya dengan teks berita sebelumnya, berita di atas adalah bentuk representasi rangkaian antarkalimat yang saling mendukung. Hal tersebut dapat dibuktikan dari *Tribunnews.com* menampilkan pendapat Uung Sendana,

"Mari kita semua menjaga dan menjamib masa tenang yang sedang berlangsung seraya menghindari berbagai bentuk intimidasi dan politisasi agama,"

Kemudian menguatkan dengan pendapat Ketua PBNU Aqil Siraj,

"Kita harus tetap bersikap tenang, tidak takut, dan berpikir jernih dalam melihat situasi. Kita harus beri kepercayaan penuh kepada pemerintah untuk mensukseskan dan menjaga pelaksanaan Pilkada Jakarta,".

⁹ <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/04/17/pemimpin-ormas-enam-agama-minta-jangan-ada-intimidasi-dan-politisasi-agama>, diakses pada hari kamis tanggal 9 Mei pukul 20.29 WIB.

Kedua partisipan dalam teks berita ini saling mendukung satu sama lain. Terlebih, keduanya menjadi bagian dari pemimpin ormas enam agama di Indonesia yang meminta meniadakan intimidasi dan politisasi agama. Menurut Fairclough, apa pun yang dipilih untuk ditampilkan di media, menunjukkan batasnya yang jauh, bagaimana kalimat yang berbeda, pendapat yang berbeda, dapat digabungkan dan dibuat berhubungan satu sama lain.

Gambar 1.28

Judul Berita *Tamasya Al Maidah Digelar saat Pilkada Jakarta, Melibatkan 1,3 Juta Orang Termasuk dari Luar Negeri*. Tribunnews, 17 April 2017.



Mobilisasi masa dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 adalah aksi terbesar sepanjang sejarah pemilihan kepala daerah. Aksi yang dikenal “Aksi Bela Islam” selain dapat memobilisasi masa hingga ribuan dari luar Jakarta, juga terdapat aksi-aksi lanjutan yang seakan tidak berkesudahan. Beberapa waktu yang lalu, di penghujung tahun 2018, aksi ini mengadakan reuni 212 yang diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas) pada tanggal 2 Desember 2018. Dilansir dari Tribun media, peserta yang turut berpartisipasi ini mencapai kurang lebih delapan sampai sepuluh juta peserta. Sebelum itu pada tanggal 19 April 2017 bertepatan dengan proses pemilihan kepala daerah serentak, aksi Tamasya Al Maidah ini menjadi salah satu aksi lanjutan dari Aksi Bela Islam yang sebelumnya pernah dilaksanakan.

Hubungan relasi menurut Fairclough dalam teks di atas, menempatkan wartawan pada posisi yang sepenuhnya menginterpretasikan hal yang masih akan terjadi. Tidak ada narasumber dalam teks, yang ada hanyalah interpretasi dari data yang sudah ada. Dapat dikatakan bahwa teks di atas sangat jauh dari unsur dasar yang harus ada dalam berita. Sebab teks di atas lebih bertendensi menjadi sebuah informasi. Selain itu, mengidentifikasi unsur berita 5W1H juga terlihat masih samar-samar untuk ditemukan pada teks di atas.

Gambar 1.29

Judul Berita *PKS Curiga Maklumat Larangan Mobilisasi Massa Diarahkan kepada Pasangan Anies-Sandi. Tribunnews, 17 April 2017.*



Dalam teks berita ini, berisi tentang ketidakterimaan PKS terhadap maklumat larangan mobilisasi massa yang dikeluarkan kepolisian Polda Metro Jaya. Maklumat tersebut terdapat tiga poin utama. *Pertama*, TNI, Polri, dan instansi akan melaksanakan pencegahan dan pemeriksaan di sepanjang jalan. *Kedua*, dilarang melakukan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis dalam bentuk kegiatan apapun. *Ketiga*, akan memberi sanksi sesuai prosedur hukum bagi warga yang masih memaksa dan tetap datang ke TPS di Jakarta.

Jika diamati dari isi maklumat di atas, tidak ada yang menjerus kepada pasangan calon tertentu yang berpotensi menimbulkan ketersinggungan pihak-pihak tertentu. Pada hakikatnya maklumat tersebut berisi mengenai himbauan agar menertibkan proses pemilihan Pilgub agar

kondusif, mengingat sebelumnya terdapat beragam peristiwa yang dapat dikatakan meresahkan masyarakat dan berpotensi mencederai perhelatan Pilkada.

Tribunnews.com menampilkan PKS sebagai orang yang benar-benar dituju oleh maklumat tersebut. Terbukti dari pendapat narasumber dalam teks berita yang ditampilkan yang keseluruhannya berisikan kekhawatiran dan kecurigaan terhadap kepolisian Polda Metro Jaya. Hal ini bisa saja terkesan wajar sebab sejauh yang diketahui banyak khalayak mobilisasi masa diadakan untuk menyerang salah satu pasangan calon gubernur yang terlibat dugaan penistaan agama—yaitu Ahok. Maka *Tribunnews.com* memposisikan kubu Anies di sini adalah yang paling terdesak, merasa bahwa maklumat tersebut ditujukan kepada lawan kubu Ahok.

Gambar 1.30

Judul Berita Penulis Status Facebook 'Perempuan Pendukung Ahok Halal Diperkosa' Dilaporkan ke Polisi. Tribunnews, 17 April 2017.



Mempraktikkan susunan kalimat secara implisit menunjukkan praktik yang ingin disampaikan wartawan kepada khalayak. Dengan penyusunan kalimat sedemikian rupa, menurut Faiclough, dapat dideteksi apakah wartawan ingin menampilkan pendapat narasumber sebagai ide dominan, atau pendapat tersebut hanya ingin dikomentasi dan dibuat untuk dijadikan *legitimate*. Sebab terkadang terjadi juga terdapat media mewawancarai pendapat yang mendukung dan yang tidak mendukung dengan jumlah orang yang sama. Tidak hanya itu, ini juga persoalan bagaimana wartawan menampilkan atau menyertakan hal-hal yang mendukung atas interpretasinya.

Berita ini menjelaskan mengenai seorang pengguna akun “Dwi Ardika” yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas unggahannya tentang

perempuan pendukung Ahok halal diperkosa. Pengguna akun *facebook* itu dijerat dengan pasal 156 KUHP tentang ujaran kebencian. Ujaran semacam ini jelas menimbulkan keresahan bagi para perempuan.

Sama seperti berita-berita yang lain dalam berita ini, *Tribunnews.com* selalu mengutip pendapat narasumber yang memiliki keselarasan (pandangan) yang ingin *Tribunnews.com* tampilkan kepada khalayak pembaca.

“Menurut Ita, ujaran itu, menimbulkan keresahan teruntuk kaum perempuan.”

“Pihaknya tak ingin kekerasan terhadap perempuan kembali terjadi di era demokrasi ini.”

“Kalau dulu karena belum ada medsos, itu lewat selebaran-selebaran, sopir-sopir bajaj, sopir taksi, dan lewat (pesan) pager itu banyak. Kejadiannya ada, pemerkosaan. Kami perempuan Indonesia tidak ingin seperti itu terjadi lagi,” sambung Ita.

“Pilkada DKI, ucap Ita, diharapkan tidak mengorbankan kaum perempuan.”

“Dia berharap Pilkada DKI Jakarta berjalan lancar, aman, dan damai.”

Kemudian, *Tribunnews.com* terakhir dalam berita ini menampilkan data yang mendukung segala yang telah diinterpretasikan melalui argumentasi narasumber, yaitu menyebutkan bahwa pemilik akun *facebook* Dwi Ardika telah mempublikasikan tulisan yang berbau provokasi dan ancaman.

“Sebelumnya pemilik akun Facebook bernama Dwi Ardika telah memposting tulisan berbau provokasi dan ancaman.”

Dia menyatakan bahwa pendukung Cagub DKI nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok Halal dibunuh dan diperkosa, "Intinya yg dukung

ahok tu goblok dan gak bermoral..halal darahnya dibunuh dan halal jga kalau wanita wanita diperkosa rame rame..." bunyi postingan di akun Facebook Dwi Ardika. Kini, akun tersebut tidak bisa diakses lagi.

Di sini, wartawan menampilkan pendapat dari narasumber dalam berita yaitu Ita Fadia Nadya seorang aktivis perempuan sekaligus koordinator perempuan Indonesia anti kekerasan. Dalam berita ini, wartawan menampilkan pendapat narasumber yang mengecam berat kejadian ini. Entah itu berupa bahasa wartawan sendiri, ataupun bahasa narasumber langsung yang ditampilkan dalam teks berita. Pada intinya semua opini dalam berita ini bersifat mendukung bahwa kejadian ini tidak bisa dibenarkan. Tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar pasal KUHP, meresahkan warga Indonesia, dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan yang ada di Negara Indonesia.

Peristiwa Aksi 411 dan 212 kemarin memunculkan sebuah hipotesa bahwa bangsa kita ternyata masih lemah dalam hal kesadaran persatuan dan kemanusiaan. Ketika ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menyulut konflik dengan menggoyahkan simbol etnis, rasial atau keagamaan, maka seketika itu pula naluri barbar kita meledak dan melumat habis sendi-sendi kemanusiaan.

Padahal sendi-sendi hakiki yang melekat semenjak manusia lahir adalah kemanusiaan bukan ras, etnis ataupun agama. Rasa kemanusiaanlah yang senantiasa mendekam dalam setiap sanubari manusia. Sejahat dan sehinah-hinanya manusia ia tetap memiliki rasa kemanusiaan meski hanya

secuil. Kapan pun rasa itu bisa tersentuh dan menyeruak dalam wujud yang beragam bentuknya.